

Publikasi Hasil Riset
Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2015

**Memperkuat Pengorganisasian Masyarakat Sipil untuk
Mempercepat Demonopolisasi di Politik dan Ekonomi**

**Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) – Departemen Ilmu Politik
FISIP Universitas Indonesia**

14 Maret 2016

PUSKAPOL FISIP UI -- yang tergabung dalam **Konsorsium Indeks Demokrasi Asia** (*Consortium of Asian Democracy Index – CADI*) bersama dengan sejumlah lembaga riset di Korea Selatan, Filipina, dan Thailand --melakukan riset mengenai Indeks Demokrasi Asia untuk kasus Indonesia tahun 2015. Puskapol UI telah melakukan riset Indeks Demokrasi Asia kasus Indonesia sejak 2011, dan pada hari ini bermaksud meluncurkan dan mendiskusikan hasil Indeks Demokrasi Asia kasus Indonesia 2015.

Pengembangan Indeks Demokrasi Asia didasari oleh pendefinisian kembali demokrasi dengan menjadikan pemaknaan transisi demokrasi sebagai **demonopolisasi** yang terjadi atas proses dan institusi dalam tiga dimensi yaitu **politik, ekonomi, dan masyarakat sipil**. Dalam upaya mengukur demonopolisasi tersebut, Konsorsium merumuskan dua prinsip utama yang diperlakukan sebagai variabel, yaitu **(1) Liberalisasi**, dan **(2) Ekualisasi**.

Variabel **Liberalisasi** diartikan sebagai *sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri*. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana monopoli kekuatan lama dapat terdisintegrasi. Variabel Liberalisasi diukur dari dua sub variabel yakni Otonomi dan Kompetisi. Sedang variabel **Ekualisasi** dimaknai sebagai *proses sejauh mana kelompok-kelompok minoritas secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan*. Dengan demikian ekualisasi merupakan sebuah proses transformasi kekuasaan di masing-masing dimensi politik, ekonomi, dan masyarakat sipil. Variabel ekualisasi diukur dari dua sub variabel yaitu Pluralisasi dan Solidaritas. Skor indeks demokrasi didapatkan dari penilaian sejumlah ahli melalui wawancara tatap muka.

Sekilas tentang Metodologi

Indeks Demokrasi Asia merupakan pengukuran univariat terhadap konsep demokrasi yang dilakukan melalui wawancara terhadap **27 responden ahli** menggunakan instrumen pengukuran berupa kuesioner dengan pertanyaan semi-tertutup. Metode yang digunakan merupakan penilaian sejumlah ahli atas indikator atau pertanyaan dengan range angka penilaian antara 0 – 10. Indikator/pertanyaan yang ditanyakan kepada ahli hanya yang sesuai dengan bidangnya (politik, ekonomi, masyarakat sipil).

Sehingga proses penentuan sampel ahli berbasis pada kategori dan kriteria yang merepresentasikan spektrum posisi dan peran dalam masyarakat serta bidang keahlian.

Proses pemilihan 27 orang ahli berdasar pada *purposive sampling* yang berbasis pada penentuan kategori dan kriteria tertentu untuk merepresentasikan spektrum ideologi, posisi, dan peran di masyarakat. Terdapat 3 hal yang dipertimbangkan dalam penentuan responden. Pertama, area atau bidang keahlian (Politik, Ekonomi, dan Masyarakat Sipil). Kedua, posisi-posisi ideologis responden ahli. Ketiga, peran di masyarakat (akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan).

Secara rinci jumlah 27 responden ahli terbagi sama jumlahnya dari 3 dimensi (politik, ekonomi dan masyarakat sipil. Tiap dimensi memiliki kuesioner dengan item pertanyaan yang berbeda dan disesuaikan pada bidang keahlian dari responden ahli. Selain itu dari masing-masing bidang harus mewakili beragam posisi ideologis (Politik: pro-demokrasi, moderat, anti-demokrasi; Ekonomi: *statist*, moderat, neo-liberal; Masyarakat Sipil: pluralis, moderat, anti-pluralis), serta peran di masyarakat (akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan).

A. Indeks Demokrasi Asia Kasus Indonesia 2015: Meningkatkan 0,39 poin dari 2014

Masa tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan konteks situasi yang melatarbelakangi hasil Indeks Demokrasi Asia untuk kasus Indonesia pada tahun 2015 ini. Keberhasilan Joko Widodo (dikenal dengan Jokowi) memenangkan kursi presiden pada Pemilu 2014 sempat dianggap sebagai kebangkitan kekuatan demokrasi Indonesia. Bahkan untuk menyambut inagurasi pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2014, majalah TIME menampilkan cover foto *close up* wajah Jokowi dengan tulisan "*A New Hope: Indonesia President Joko Widodo is A Force of Democracy*".

Kemenangan Jokowi ditengarai memberikan warna 'baru' dalam proses demokrasi Indonesia. Sosok Jokowi yang dianggap sebagai 'orang baru' dalam kancah politik nasional, bukan figur utama alias tidak memegang jabatan tinggi di partai politiknya, tidak memiliki ikatan dengan kekuatan rezim lama, serta karir politik yang meroket dalam waktu relatif singkat yaitu dari walikota (menjalani periode ke dua) lalu terpilih sebagai gubernur, dan baru 2 tahun menjabat gubernur dicalonkan sebagai presiden. Selintas hal itu menandai ada yang berubah dalam rekrutmen dan sirkulasi kepemimpinan politik nasional yang dilakukan partai politik. Sementara itu di DPR juga terjadi perubahan kekuatan politik dengan kemenangan PDIP yang meraih kursi terbanyak. Kolaborasi Jokowi di eksekutif dan PDIP sebagai partai pendukung Jokowi di legislatif diprediksi banyak pengamat akan memuluskan agenda-agenda perubahan yang signifikan. Maka istilah *new hope* seperti cover majalah TIME itu sangat dinantikan pada tahun pertama pemerintahannya.

Tampaknya konteks jalannya pemerintahan pada tahun pertama Jokowi memberikan pengaruh pada skor indeks demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Hasil pengolahan data mencatat skoragregat indeksdemokrasi untuk kasus Indonesia tahun 2015 (politik, ekonomi, masyarakat sipil) adalah **5,81**, meningkat dari skor indeks 2014 yang sebesar 5,42. Berartiterjadi kenaikan sebesar 0,39 poin dari skor indeks tahun 2014. Selain itu

skor pada 2015 ini adalah yang tertinggi sejak riset Indeks Demokrasi Asia kasus Indonesia dilakukan pada 2011. Berikut informasi skor Indeks Demokrasi Asia kasus Indonesia sejak 2011 hingga 2015:

Tabel 1. Indeks Demokrasi Asia Kasus Indonesia 2011 - 2015

Tahun	Skor Indeks Demokrasi Indonesia	Selisih
2011	4,99	--
2012	5,32	Naik 0,33
2013	4,97	Turun 0,35
2014	5,42	Naik 0,45
2015	5,81	Naik 0,39

Tabel 1 menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia dalam 5 tahun ini masih menunjukkan rata-rata pada kondisi **sedang** (skala 1 – 10). Kenaikan yang mencapai 0,39 poin pada 2015 ini (dari 5,42 menjadi 5,81) disumbang oleh meningkatnya skor pada dua variabel utamanya yaitu liberalisasi dan ekualisasi. Simak tabel berikut ini:

Tabel 2: Indeks Demokrasi Asia Kasus Indonesia 2015

Liberalisasi		Ekualisasi		Indeks Demokrasi Indonesia
6,10		5,39		5,81
Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
6,04	6,15	5,01	5,73	

Tabel 2 menunjukkan dari dua variabel pembentuknya, skor liberalisasi lebih tinggi (6,1) daripada ekualisasi (5,39). Skor liberalisasi yang berada di kisaran sedang (skor 6 dari skala 1-10) menunjukkan struktur dan kekuatan otoritarian masih bertahan dalam sistem demokrasi Indonesia di tiga dimensi (politik, ekonomi, masyarakat sipil). Ini diperburuk dengan masih relatif rendahnya skor ekualisasi yang menunjukkan sempitnya akses warga negara, terutama kelompok-kelompok marjinal, pada sumber daya politik, ekonomi dan sosial. Demikian halnya dengan skor variabel ekualisasi berada pada kisaran sedang (skor 5 dari skala 1-10) di mana masih ada persoalan bagi kelompok-kelompok marjinal secara substansial memiliki akses pada sumber daya politik, ekonomi, dan sosial.

Namun jika dilihat tren skor indeks sejak 2011 hingga 2015 ini, ada gejala peningkatan proses demonopolisasi yang berarti ada kecenderungan semakin otonom dan independen sektor-sektor di masyarakat dari kekuatan politik lama (otoriter) sehingga dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri, serta relatif meluasnya peluang kelompok marjinal untuk memiliki akses terhadap sumber daya. Skor variabel liberalisasi dan ekualisasi menunjukkan tren meningkat dalam 5 tahun ini, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3: Skor Variabel Liberalisasi dan Ekualisasi dalam Indeks Demokrasi 2011-2015

Tahun	Liberalisasi	Selisih	Ekualisasi	Selisih
2011	5,49	--	4,50	--
2012	5,60	Naik 0,11	5,02	Naik 0,52
2013	5,23	Turun 0,37	4,71	Turun 0,31
2014	5,79	Naik 0,56	4,82	Naik 0,11
2015	6,10	Naik 0,31	5,39	Naik 0,57

Tabel di atas memperlihatkan bahwa skor variabel liberalisasi dan ekualisasi mencapai skor tertinggi pada tahun 2015 ini. Pada skor variabel liberalisasi, kenaikan paling signifikan terjadi dari 2013 ke 2014 yang berselisih 0,56 poin. Sementara kenaikan dari skor 2014 ke 2015 hanya 0,31 poin yang berarti cenderung tidak berubah secara signifikan. Skor variabel ekualisasi juga mencapai kondisi tertinggi pada tahun 2015 (5,39) dan jika dibandingkan dengan skor 2014 mengalami kenaikan signifikan yaitu 0,57 poin. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa ruang-ruang partisipasi dalam masyarakat untuk mengakses sumber daya politik, ekonomi, dan sosial makin terbuka dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok warga. Jika dilihat skor variabel liberalisasi dan ekualisasi selama 2011-2015 maka proses demonopolisasi terjadi secara bertahap dan perlahan.

B. Gambaran Skor Dimensi Politik, Ekonomi, dan Masyarakat Sipil

Dimensi Politik 2015: Makin Kuatnya Kebebasan Sipil

Skor dimensi politik 2015 adalah **6,79**, yang merupakan skor tertinggi dibanding skordimensi ekonomi (4,78) dan masyarakat sipil (5,75). Dapat dikatakan skor dimensi politik selalu paling tinggi dibanding dua dimensi yang lain sejak pengukuran indeks demokrasi dilakukan (2011). Skor dimensi politik dihasilkan dari skor liberalisasi 6,81 dan skor ekualisasi 6,78.

Tabel 4: Skor Indeks Dimensi Politik 2015

Dimensi POLITIK	Liberalisasi		Ekualisasi		Skor
	6,81		6,78		6,79
	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
	7,75	6,17	6,86	6,71	

Skor dimensi politik 2015 memang mencapai yang tertinggi dalam 5 tahun ini. Pada 2011, skor dimensi politik adalah 5,50 yang kemudian mengalami kenaikan signifikan pada 2012 sebesar 0,66 poin menjadi 6,16. Skor dimensi politik mengalami penurunan signifikan pada 2013 sebesar 0,68 poin, yaitu dari 6,16 pada 2012 menjadi 5,48 pada 2013. Lalu secara dramatis, skor dimensi politik mengalami kenaikan pada 2014 dengan selisih mencapai 1,24 poin dari skor 2013 (dari 5,48 menjadi 6,72). Seperti diketahui 2014 merupakan tahun pemilu di mana Presiden SBY tidak bisa mencalonkan lagi sehingga muncul persaingan terbuka dan ketat di antara kekuatan politik. Pada 2014 pula ada fenomena relawan politik yang merujuk pada munculnya kelompok-

kelompok warga terorganisir untuk mendukung kandidat tertentu (khususnya pilpres). Namun skor dimensi politik hanya bergerak sangat sedikit pada 2015 ini, yaitu hanya berselisih 0,07 poin dibandingkan skor 2014 (dari 6,72 menjadi 6,79).

Skor dimensi politik yang stagnan tersebut sekaligus mengkonfirmasi perubahan elit dan partai politik dari 2014 ke 2015 yang ditandai oleh bergesernya polarisasi kekuatan politik elit (2014) menuju kompromi politik pada tahun pertama pemerintahan Jokowi (2015). Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya *reshuffle* kabinet yang mengakomodasi kekuatan politik partai-partai (termasuk yang semula berada di blok berlawanan dengan pemerintah), jugaditandai bubarnya KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH(Koalisi Indonesia Hebat).

Di sisi lain, sub variabel otonomi politik yang menjadi bagian dari variabel liberalisasi mendapatkan skor tertinggi (7,75) jika dibandingkan sub-variabel lainnya (kompetisi, pluralisasi, dan solidaritas). Bahkan otonomi dalam dimensi politik menjadi sub-variabel yang mengalami kemajuan paling pesat selama 5 tahun pengukuran Indeks Demokrasi Asia di Indonesia.Terutama pada 2013 ke 2014, skor sub variabel otonomi dalam politik mengalami kenaikan 1,34 poin yaitu dari 6,30 (2013) menjadi 7,64 (2014). Sementara dari 2014 (7,64) ke 2015 (7,75), kenaikan skor sub variabel otonomi berselisih 0,11 poin saja tetapi dengan pencapaian skor yang tertinggi dalam 5 tahun ini. Tingginya skor ini menunjukkan sudah semakin kuatnya kebebasan sipil.

Dimensi Ekonomi 2015: Ketidaksetaraan dalam Ekonomi Makin Akut

Skor dimensi ekonomi 2015 adalah **4,78** yang merupakan skor terendah dibanding skordimensi politik (6,79) dan dimensi masyarakat sipil (5,75).Di sisi lain, pencapaian skor dimensi ekonomi pada 2015 ini merupakan yang tertinggi sejak 2011, dan juga mengalami kenaikan sangat penting dibandingkan skor 2014.

Tabel 5: Skor Indeks Dimensi Ekonomi 2015

DIMENSI EKONOMI	Liberalisasi		Ekualisasi		Skor
	5,43		4,34		4,78
	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
	5,36	5,50	3,20	4,18	

Dibandingkan skor dimensi politik dan masyarakat sipil, skor dimensi ekonomi selalu yang paling rendah yaitu berada di kisaran angka 4 (skala 1-10). Pada 2011 skornya adalah 4,24 kemudian mengalami kondisi turun naik pada 2012 hingga 2014, untuk kemudian naik secara signifikan pada 2015 dengan selisih mencapai 0,37 poin dibanding skor 2014 – dari 4,41 menjadi 4,78 -- tetapimasih tetap pada kisaran angka 4 (skala 1-10) dan terendah dibanding dua dimensi lainnya. Lihat dinamika skor dimensi ekonomi pada tabel berikut ini:

**Tabel 6. Skor Dimensi Ekonomi dalam Indeks Demokrasi Asia
Kasus Indonesia pada 2011 - 2015**

Tahun	Skor Dimensi Ekonomi	Selisih
2011	4,24	--
2012	4,21	Turun 0,03
2013	4,49	Naik 0,28
2014	4,41	Turun 0,08
2015	4,78	Naik 0,37

Skor dimensi Ekonomi tahun 2015 menunjukkan situasi berikut ini:

1. Skor dimensi ekonomi 2015 yang sebesar 4,78 dihasilkan dari dua skor variabel utama yaitu liberalisasi sebesar 5,43 dan ekualisasi sebesar 4,43. Jika dilihat perkembangan dari masing-masing variabel sejak pengukuran indeks tahun 2011 hingga 2015, kenaikan dalam variabel liberalisasi lebih tinggi daripada ekualisasi. Data menunjukkan pada 2014, skor liberalisasi dalam dimensi ekonomi sebesar 5,02 dan skor ekualisasi sebesar 4,00. Kemudian pada 2015 nilai skor dua variabel tersebut meningkat, yaitu liberalisasi naik 0,41 poin dibanding skor 2014 dan ekualisasi naik 0,34 dibanding skor 2014.
2. Variabel ekualisasi memiliki dua sub variabel yaitu pluralisasi dan solidaritas, yang dalam dimensi ekonomi memiliki kecenderungan rendah dibandingkan dua dimensi lainnya dalam 5 tahun ini. Pada dimensi ekonomi 2015, skor sub variabel pluralisasi lebih rendah dibanding solidaritas yaitu 3,2 dibanding 4,18. Tetapi justru skor sub variabel solidaritas yang mengalami penurunan signifikan dibanding skor yang diraihinya pada 2014, sedangkan skor sub variabel pluralisasi naik dari 2014 ke 2015 ini. Simak data berikut ini:

	Pluralisasi dalam dimensi ekonomi	Selisih	Solidaritas dalam dimensi ekonomi	Selisih
2014	2,88		4,80	
2015	3,20	Naik 0,32	4,18	Turun 0,62

Fenomena turunnya skor solidaritas dalam dimensi ekonomi sangat menarik karena terjadi di tengah adanya program jaminan sosial (seperti BPJS) dan program-program pemerintah yang bersifat perlindungan untuk orang miskin (kartu-kartu sejahtera untuk kesehatan dan pendidikan) sebagai program unggulan pemerintahan Jokowi. Indikator sub variabel solidaritas dalam dimensi ekonomi antara lain adalah perlindungan untuk orang miskin, asuransi/jaminan sosial, kontrol publik terhadap perusahaan, dan level partisipasi serikat-serikat pekerja. Turunnya skor solidaritas dalam dimensi ekonomi yang dramatis patut dicermati sebagai peringatan bahwa program-program kesejahteraan dan perlindungan untuk kelompok marjinal (miskin) belum berjalan maksimal dan secara substansi belum menunjukkan kesetaraan akses sumber daya.

Sementara itu, naiknya skor pluralisasi dalam dimensi ekonomi pada 2015 ini (naik 0,32 poin dari skor 2014 ke 2015) perlu dicermati sebagai gejala makin menguatnya kekuatan monopoli kelompok-kelompok ekonomi tertentu di satu

sisi, dan makin tingginya kesenjangan pendapatan antardaerah dan antarkelompok di sisi yang lain. Indikator sub variabel pluralisasi dalam dimensi ekonomi meliputi monopoli kelompok tertentu, disparitas pendapatan antardaerah, diskriminasi terhadap pekerja, dan kesenjangan kepemilikan aset. Hal tersebut menunjukkan program-program perlindungan sosial hampir tidak memengaruhi kesetaraan akses pada sumber daya ekonomi, sementara kekuatan monopoli dalam ekonomi makin mencengkram. Dengan kata lain ketidaksetaraan ekonomi semakin akut.

3. Skor pluralisasi dalam dimensi ekonomi menunjukkan tidak berubahnya struktur perekonomian yang monopolistik di Indonesia. Hal ini terlihat dengan semakin menguatnya monopoli dari kelompok-kelompok tertentu, ketimpangan antarwilayah, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pemilikan aset serta ketimpangan dan diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Menurunnya skor sub-variabel solidaritas secara signifikan di tahun 2015 menunjukkan semakin rendahnya kemampuan serikat pekerja dan masyarakat pada umumnya untuk mengontrol dan memengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan besar atau korporasi.
4. Pencapaian skor dimensi ekonomi pada 2015 ini dapat dimaknai sebagai belum berhasilnya transformasi struktur perekonomian yang monopolistik dan oligarkis setidaknya dalam 5 tahun ini. Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2015 juga dipengaruhi oleh lesunya perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi 5,04% di triwulan IV tahun 2015 mendorong pemerintah Jokowi-JK menginisiasi kebijakan-kebijakan yang sangat pro-pasar dengan menekankan pada pembangunan infrastruktur, kemudahan untuk mendatangkan investor asing termasuk mempermudah pemilikan asing terhadap beberapa sumber daya alam seperti air dan tambang. Dengan kata lain, nilai-nilai dari sistem ekonomi kerakyatan yang ditawarkan dalam Nawacita pada masa kampanye Jokowi-JK tidak menjadi landasan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang. Sebagai dampak dari pilihan kebijakan tersebut, struktur perekonomian yang monopolistik tidak mengalami pergeseran.

Dimensi Masyarakat Sipil: Bebas tapi Pengorganisasian Belum Kuat

Skor dimensi masyarakat sipil 2015 adalah **5,75** yang lebih rendah dibanding skordimensi politik (6,79) tetapi lebih tinggi dari dimensi ekonomi (4,78).

Tabel 7: Skor Indeks Dimensi Masyarakat Sipil 2015

Dimensi MASYARAKAT SIPIL	Liberalisasi		Ekualisasi		Skor
	5,95		5,43		5,75
	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas	
	5,35	6,67	5,47	5,37	

Secara umum, skor agregat di dimensi masyarakat sipil tahun 2015 adalah 5,75. Skor ini meningkat 0,60 dari tahun 2014 (5,15). Dengan selisih 0,60 poin dari 2014 maka skor dimensi masyarakat sipil mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan skor dimensi ekonomi dan politik. Naiknya secara signifikan skor dimensi masyarakat sipil sebesar 0,6 dari 2014 ke 2015 menunjukkan ada dinamika demonopolisasi yang cukup intens selama setahun terakhir ini. Skor dimensi masyarakat sipil 2015 menunjukkan situasi berikut ini:

1. Pada dimensi masyarakat sipil, hampir seluruh sub-variabel (otonomi, kompetisi, dan pluralisasi) mengalami peningkatan dari skor tahun 2014. Hanya sub-variabel solidaritas yang relatif stagnan. Sub-variabel otonomi meningkat sebesar 0,45 (dari 4,90 di tahun 2014 menjadi 5,35 di tahun 2015). Sub-variabel kompetisi, mengalami peningkatan 0,84 (dari 5,83 di tahun 2014 menjadi 6,67 di tahun 2015). Untuk sub-variabel pluralisasi, skor meningkat paling dramatis yaitu 0,97 (4,50 di tahun 2014 menjadi 5,47 di tahun 2015). Sementara solidaritas mengalami sedikit penurunan 0,01 (5,38 di tahun 2014 menjadi 5,37 di tahun 2015). Makin terbukanya akses terhadap informasi dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat merupakan indikator penting dalam meningkatnya skor pluralisasi dalam dimensi masyarakat sipil.
2. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil mengalami penguatan yang signifikan. Masyarakat sipil relatif bebas dari pengaruh kekuatan negara dan pasar, serta relatif independen untuk membawa aspirasi publik. Namun demikian, penguatan masyarakat sipil ini belum diikuti dengan kesadaran membangun organisasi yang kuat (terfragmentasi) yang pada gilirannya dapat memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Di sisi lain, penguatan masyarakat sipil belum mampu mendorong keberpihakan negara pada kelompok marginal.
3. Temuan ini dapat direfleksikan dengan semakin meningkatnya partisipasi publik Indonesia dalam memengaruhi kebijakan. Sebagai contoh, kriminalisasi pimpinan KPK mendapat sorotan publik yang cukup kuat dimana mayoritas publik memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah atau kepolisian. Walau begitu perbedaan opini publik ini tidak berarti membuat proses kriminalisasi tersebut dihentikan. Pemerintahan Jokowi yang diharapkan oleh publik mampu melakukan intervensi untuk menghentikan kriminalisasi, justru tidak melakukan apapun.

C. Kesimpulan

1. Dari pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia 2015, masalah yang terbesar terdapat pada dimensi ekonomi yang masih monopolistik.
2. Kemajuan demokrasi atau terjadinya demonopolisasi akan sangat tergantung pada kemajuan secara bersamaan variabel otonomi, kompetisi, pluralisasi dan solidaritas dalam tiga dimensi politik, ekonomi, dan masyarakat sipil.
3. Perlunya pemahaman bahwa demokrasi merupakan inter relasi berbagai dimensi (politik, ekonomi, dan masyarakat sipil).
4. Salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi Indonesia ke depan adalah mengatasi masalah fragmentasi dan belum kuatnya pengorganisasian

masyarakat sipil untuk mendorong demonopolisasi pada ranah politik dan ekonomi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

1. Riaty Raffiudin (No HP: 0815 741 99 619)
2. Panji Anugrah Permana (No HP: 0857 231 1567)
3. M, Ridho (No. HP: 0812 8056 8170)

PUSKAPOL FISIP UI

Gedung B, lantai 2 Kampus UI FISIP UI

Depok 16424

Telp: (021) 786-5879

Fax: (021) 7888-7063

E-mail: puskapolui@gmail.com